

Artikel Penelitian/Article Review Perspektif Pendidikan Nasional

Melkianus Suluh

Program Studi Pendidikan Fisika, STKIP Weetebula, Jl. Mananga Aba, Sumba Barat Daya-NTT, Indonesia

Email: smelkieinstein@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
--------------	----------

Article history
Received: July 2018
Revised: August 2018
Accepted: October 2018
Published: December 2018

Keywords
The National Education;
Character Education;
Professionalism

[Title: *The National Education Perspective*]. This paper aims to describe the fulfillment of quality educator resources, the concept of national education quality, and the role of education in shaping the character of the nation. This study uses a library research approach (*Library Research*) with steps (1) choosing research topics, (2) searching for supporting information, (3) determining the focus of research, (4) classifying supporting materials, (5) reading and making research notes, (6) review and enrich reading material, and (7) carry out source analysis. The data analysis technique used is descriptive analysis by concentrating on solutions or solving problems raised. The results of this study indicate (1) the fulfillment of professional educator resources is filled with conventional methods, namely through the awarding of the teaching profession through certification programs, while in innovative ways carried out through training activities, increasing teacher capacity through the provision of scholarship programs, and the introduction of teacher prefectures (2) the concept of national education quality is fulfilled with the implementation and achievement of eight national education standards; (3) education has the role of forming noble characters and personalities through attitude formation, by making affective domains as protectors for the skills and cognitive domains.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
--------------	---------

Sejarah Artikel
Dikirim: Juli 2018
Direvisi: Agustus 2018
Diterima: Oktober 2018
Dipublikasi: Desember 2018

Kata kunci
Pendidikan nasional;
Pendidikan karakter;
Profesionalisme

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan sumber daya pendidik yang berkualitas, konsep mutu pendidikan nasional, dan peran dunia pendidikan dalam membentuk karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan langkah-langkah (1) memilih topik penelitian, (2) mencari informasi pendukung, (3) menentukan fokus penelitian, (4) mengklasifikasikan bahan pendukung, (5) membaca dan membuat catatan penelitian, (6) mereview dan memperkaya bahan bacaan, dan (7) melaksanakan analisis sumber. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan berkonsentrasi pada solusi atau pemecahan masalah yang dikemukakan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pemenuhan sumber daya pendidik profesional dipenuhi dengan cara konvensional, yakni melalui pemberian penghargaan terhadap profesi guru melalui program sertifikasi, sedangkan dengan cara inovatif dilakukan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas guru melalui pemberian program beasiswa, dan diberlakukannya program profesi guru, (2) konsep mutu pendidikan nasional terpenuhi dengan terlaksananya dan tercapainya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, (3) pendidikan memiliki peran membentuk karakter dan pribadi yang luhur melalui pembentukan sikap, dengan menjadikan domain afektif sebagai pengayom bagi domain keterampilan dan kognitif.

How to Cite this Article? Suluh, M. (2018). Perspektif Pendidikan Nasional. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika*, 2(1), 1-9.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam era modern telah berkembang menjadi sebuah kebudayaan baru yang terintegrasi dalam perkembangan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tuntutan di masa mendatang (Suci dkk., 2018). Perkembangan kehidupan mendorong setiap individu untuk berkembang dengan terlibat dan menjadi bagian dari sebuah pendidikan. Pendidikan bukan lagi barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu, melainkan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Anggaraeni dan Sole (2018) yang menyatakan pendidikan di era modern atau abad 21 berorientasi pada komunikasi digital, semakin memperkuat pernyataan bahwa pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Permasalahannya adalah apakah setiap masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang perlu dilaksanakan secara sadar dan terencana?

Pendidikan berasal dari kata didik yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (KBBI). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam mewujudkan manusia yang cerdas, berakhlak mulia serta memiliki keterampilan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengajaran dan pelatihan.

Filosofi pendidikan bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dalam batang tubuh UUD 1945 yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa". Bangsa dalam hal ini mencakup keseluruhan lapisan masyarakat dari ujung barat ke ujung timur, serta dari utara ke selatan. Dunia pendidikan nasional hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok negeri. Pemerataan pendidikan seolah menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai.

Landasan pengembangan pendidikan di Indonesia di antaranya pengembangan kurikulum berdasarkan pada ketentuan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan teoritik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan. Landasan filosofis mengarah kepada pembentukan manusia yang akan dihasilkan kurikulum berdasarkan pengalaman masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Landasan empiris, landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan, sedangkan landasan teoritis memberikan dasar-dasar teori pengembangan dengan menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal yang harus dikuasai warga negara berdasarkan jenjang pendidikan (Kemendikbud, 2013).

Novialiant (2012) menjelaskan UNESCO sebagai komisi pendidikan Internasional mengemukakan empat pilar pendidikan, yaitu *Learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, *learning to live together*. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), artinya peserta didik belajar sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. *Learning to do* (belajar dengan cara beraktifitas), artinya peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan latihan dan praktek. Tujuannya peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuannya dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. *Learning to be*, artinya peserta didik dapat belajar menjadi diri sendiri dan mengetahui yang terbaik bagi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah *learning to live together* (belajar hidup bersama). Artinya peserta didik diajarkan untuk dapat hidup bersosialisasi dengan sesama, dengan cara saling memahami, menghormati (Delors, 1996). Dari sini, diharapkan peserta didik menjadi individu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi insan yang berkarakter dan berakhlak mulia yang mengerti tentang tugas dan tanggung jawab.

Konsep pendidikan nasional menempatkan bentuk-bentuk pendidikan tersebut dalam tiga ranah yang meliputi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) yang dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Namun demikian, urgensi dari ketiga aspek tersebut secara riil belum berperan dalam pembentukan pengetahuan peserta didik. Indeks Pembangunan Pendidikan di Indonesia berdasarkan laporan UNESCO tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Penilaian tersebut didasarkan pada empat indikator penilaian yang meliputi angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (Priansa, 2014). Berdasarkan indikator penilaian tersebut, dapat menjadi gambaran tentang tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, dan tingkat keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Secara nasional, hasil tersebut dapat menjadi acuan strategis dalam melakukan pembenahan di bidang pendidikan.

Implikasi dari pembenahan tersebut adalah terjadi perubahan pada paradigma pendidikan. Semua orang secara bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan "apa yang dapat kita kerjakan bersama untuk mendidik semua anak dengan baik?" (Priansa, 2014). Artinya bahwa mendidik bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau instansi pendidikan, melainkan melibatkan peran serta dari semua pemangku kepentingan (Pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan peserta didik itu sendiri).

Mengingat banyaknya indikator pemenuhan kualitas dan mutu pendidikan, beberapa pertanyaan yang diangkat diangkat dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimanakah pemenuhan sumber daya pendidik yang berkualitas? (2) Bagaimanakah konsep mutu pendidikan nasional? (3) Bagaimanakah peran dunia pendidikan dalam membentuk karakter bangsa?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan mengadaptasi langkah-langkah peneliti dalam Zed (2008), yakni (1)

memiliki topik penelitian, (2) mencari informasi pendukung, (3) pertegas fokus penelitian, (4) mengklasifikasikan bahan pendukung, (5) membaca dan membuat catatan penelitian, (6) mereview dan memperkaya bahan bacaan, dan (7) melaksanakan analisis sumber. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan berkonsentrasi pada solusi atau pemecahan masalah yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Daya Pendidik Profesional

Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) mengatakan “*No teachers no education, no education no economic and social development* (Surya, 2013)”. Ungkapan tersebut menunjukkan pentingnya peran guru terhadap segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa guru, pendidikan, ekonomi, perkembangan kehidupan sosial menjadi sulit tercapai. Sehingga menjadi tidak salah ketika dikatakan bahwa guru adalah pintu gerbang kemajuan semua unsur kehidupan.

Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik yang memiliki sertifikasi khusus dan memiliki kualifikasi minimum sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Keberadaan guru selanjutnya dijelaskan dalam UU nomor 14 tahun 2005, di mana guru adalah tenaga profesional yang memiliki pendidikan profesi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Kenyataannya Undang-Undang tersebut hingga saat ini menjadi masalah bagi pemerintah, karena tugas peningkatan kualifikasi akademik dan keprofesionalan guru merupakan tanggungjawab pemerintah. Hingga saat ini pemenuhan terhadap UU tersebut masih jauh dari harapan. Data nasional menunjukkan bahwa terdapat 1.4 juta guru yang ber-NUPTK yang belum memenuhi standar sertifikasi dari 3 juta guru. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum PGRI Sulistiyo.

Upaya pemerintah untuk mendorong guru melalui program sertifikasi, pemberian tunjangan profesi, belum benar-benar menjawab permasalahan pendidikan. Persoalan baru yang kemudian muncul adalah, apakah guru yang telah memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi benar-benar telah memenuhi standar profesionalisme sebagaimana diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005? Ataukah dapat diasumsikan bahwa setiap guru yang memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi telah memiliki empat kompetensi guru, yakni (1) kompetensi pedagogik (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian?.

Menurut Priansa (2014) guru profesional harus memiliki visi mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam memenuhi hak setiap warganegara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang guru untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan mengingat perkembangan teknologi informasi telah memudahkan setiap orang belajar sebelum terjadinya proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi informasi juga berimplikasi terhadap perubahan paradigma pembelajaran, dimana bila sebelumnya guru adalah sumber informasi dan pengetahuan, berubah menjadi guru sebagai pengarah, dan penguat informasi

yang telah dimiliki peserta didik. Hal ini juga berimbas pada sistem pembelajaran yang semula berpusat pada guru, berkembang menjadi guru sebagai fasilitator. Perkembangan dan perubahan tersebut sudah seharusnya diringi dengan penguatan kapasitas dari seorang guru. Sergiovanni (Mantja, 2002) menegaskan bahwa *“teachers are expected to put their knowledge to work to demonstrate they can do the job. Finally, professional are expected to engage in a life long commitment to self improvement. Self improvement is the will-grow competency area”*. Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa program sertifikasi dan pengakuan guru sebagai profesi yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi harus diimbangi dengan penataan dan pembenahan kemampuan dalam rangka meningkatkan kompetensi, serta efek lanjutannya, yakni kualitas dan mutu pendidikan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanggungjawab terhadap pendidikan bukan hanya merupakan tugas pemerintah, demikian halnya dengan pemenuhan sumber daya pendidik yang profesional merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah berupaya meningkatkan kualitas pendidik dengan berbagai langkah konvensional dan inovatif. Upaya-upaya konvensional dapat terlihat dari pemberian penghargaan terhadap profesi guru melalui program sertifikasi, upaya inovatif dilakukan pemerintah melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas guru melalui pemberian program beasiswa, hingga yang upaya terakhir adalah diberlakukannya program profesi guru (PPG). Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menghadirkan kualitas mutu pendidikan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, guru dapat bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh telah mengembangkan diri dalam menjawab tuntutan terhadap profesi guru.

2. Konsepsional Mutu Pendidikan Nasional

Standarisasi mutu pendidikan merupakan salah satu cara yang diberlakukan pemerintah dalam menjawab tujuan pendidikan nasional. Sistem penjamin mutu pendidikan menjadi penting mengingat banyaknya instansi/lembaga yang terlibat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Citra pendidikan nasional, lembaga pendidikan, dan pelaku pendidikan perlu dijaga melalui penetapan aturan yang jelas, tegas, dan memiliki payung hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dikeluarkannya PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan, artinya bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki kewajiban dalam pemenuhan standar tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan), kualitas dan juga diartikan sebagai satuan ukuran. Mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai keberhasilan atau prestasi yang dicapai lembaga pendidikan dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan yang bermutu, Priansa

(2014) memiliki pendapat tersendiri, yaitu pendidikan dikatakan bermutu bila pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik secara fisik (mendapatkan imbalan financial), maupun psikis (kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan bakat dan kreativitas). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu dan mutu pendidikan berkaitan dengan kepuasan pelanggan atau konsumen pendidikan terhadap nilai yang diterima, dan kepuasan lembaga penghasil terhadap nilai yang dihasilkan.

Berkaitan dengan mutu pendidikan, konsep mutu pendidikan nasional secara utuh dapat terlihat dari pemenuhan terhadap delapan standar pendidikan nasional. Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa kualitas dan mutu pendidikan nasional akan terjawab bilamana 8 delapan standar nasional pendidikan telah dapat terpenuhi. Kedelapan standar pendidikan tersebut adalah: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

3. Pembentukan Karakter Bangsa

Pendidikan dan konsep pendidikan nasional tidak sebatas dalam penyampaian pokok bahasan, penguasaan materi pembelajaran, namun juga mencakup pembinaan sikap dan keterampilan. Pentingnya pembinaan sikap tidak sebatas dalam pembinaan tata krama, sopan santun, cara pergaulan di sekolah, namun juga mengamit pada kehidupan sosial masyarakat.

Pentingnya pendidikan karakter dalam setiap aspek pendidikan, tidak lain karena adanya degradasi moral yang dari tahun-ketahun. Penurunan tersebut dapat dijumpai dari maraknya perkelahian antar pelajar, mahasiswa, maraknya aksi demonstrasi yang berujung pada kekerasan, banyaknya kecurangan penyelenggara pendidikan, hingga pelaksanaan ujian nasional (BNSP, 2010), plagiarisme, menyontek, penyalagunaan wewenang, hingga KKN yang melibatkan semua pihak, ketidakpedulian terhadap etika berpakaian, rasa hormat (Zuchdi, dkk, 2015). Zuchdi juga menggambarkan bahwa degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat ditandai oleh memudarnya jiwa kebhinekaan, gotong royong, kebersamaan, sikap santun, serta munculnya konflik yang mengatasnamakan SARA. Dalam dunia pendidikan tinggi, salah satu bentuk pendidikan karakter yang ditekankan adalah masalah plagiarisme. Permasalahan tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa, melainkan juga pada tataran tingkat pendidik. Kemudahan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan telah menjerumuskan sebagian akademisi untuk melakukan praktek plagiarisme. Mengantisipasi mewabahnya "konsep copy paste", perlu menjadi perhatian bersama dalam melakukan pembinaan.

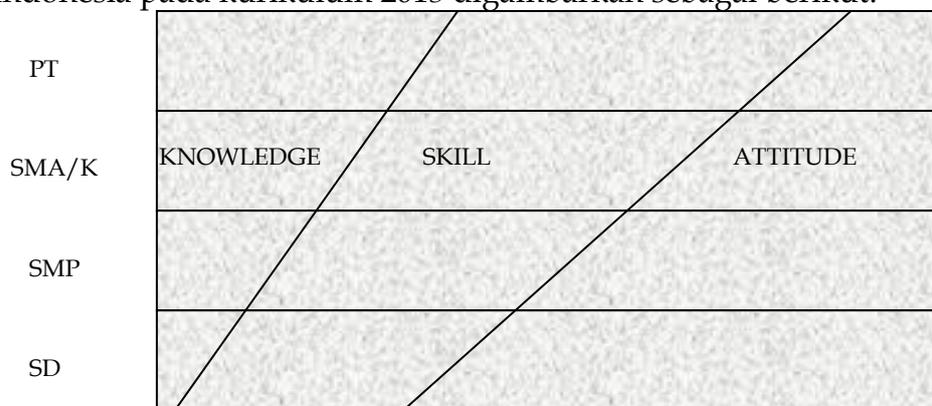
Pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi merupakan lembaga yang bertugas membina, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang merupakan *agen of change* harus mampu membangun karakter bangsa. Misi besar tersebut menuntut semua aspek dan komponen pendidikan peduli akan masalah moral dan karakter.

Ahli pendidikan mempercayai bahwa hanya melalui konsep pendidikan karakter suatu bangsa dapat membangun peradabannya, sehingga dapat menjadi jawaban dari berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya degradasi moral.

Proses internalisasi karakter dalam diri individu menurut Lickona dalam Indonesia (2005) terjadi melalui tiga tahap, yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang kebaikan, yang selanjutnya timbul komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya peserta didik benar-benar melakukan kebaikan (Wibowo, 2013).

Pentingnya pendidikan karakter telah disadari sejak jaman perjuangan yang dituangkan dalam teks pembukaan UUD 1945 dan dalam UUSPN nomor 20 tahun 2003 pengganti UU nomor 2 tahun 1989 yang mana didominasi oleh domain afektif, yaitu pendidikan nasional yang berakar pada pancasila, UUD 1945, nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan karakter bangsa ditentukan oleh pembentukan karakter pribadi yang luhur. Artinya pembentukan manusia Indonesia dimulai oleh pembentukan sikap. Dengan kata lain, domain afektif dapat menjadi pengayom bagi domain keterampilan dan kognitif. Walaupun kondisi riil menunjukkan hal sebaliknya, yaitu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah indikator kognitif.

Pendidikan karakter dalam dunia pendidikan sepenuhnya disadari oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari beberapa kurikulum terakhir mengedepankan konsep pendidikan karakter. Namun sebaiknya-baiknya pemerintah mendesain kurikulum akan "mubasir" jika tidak dapat diterapkan dengan baik dilapangan. kurikulum terakhir, kurikulum 2013 telah dengan jelas memetakan bentuk pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, dimana pembinaan sikap, pengetahuan dan keterampilan telah dibuat sedemikian rupa yang menggambarkan perkembangan manusia Indonesia yang utuh. Konsep manusia Indonesia pada kurikulum 2013 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Konsep keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. (Diadopsi dari Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat perlunya pembinaan sikap sedari dini dalam membina karakter manusia Indonesia. Pendidikan karakter perlu dibudayakan kembali dalam dunia pendidikan, karena hanya melalui pendidikan karakter, budaya suatu bangsa dapat terbangun dengan baik.

KESIMPULAN

Mengacu pada konsep pendidikan nasional, mutu output atau keluaran dunia pendidikan ditentukan bagaimana dunia pendidikan atau pelaku pendidikan memenuhi dan menerapkan standar mutu pendidikan. Standar mutu yang memberikan kesempatan kepada pelaku internal pendidikan mengembangkan

kompetensi dan kreativitas yang mendukung terlaksananya pendidikan yang berkualitas. Terdapat delapan standar nasional pendidikan yang merupakan standar minimal pemenuhan kualitas dan mutu pendidikan nasional.

SARAN

Salah satu unsur utama penentu kemajuan dan kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagai salah satu sumber utama, kompetensi pendidik senantiasa perlu untuk selalu ditingkatkan sehingga benar-benar terbentuk tenaga pendidik yang profesional, yakni tenaga pendidik yang menguasai empat kompetensi utama (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian).

Unsur lain yang turut mempengaruhi perkembangan nilai kehidupan berbangsa adalah pembentukan nilai karakter anak bangsa yang mampu mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Bangsa yang besar tidak hanya berdasarkan pada kemajuan IPTEK, tetapi juga bangsa yang memiliki karakter dan budaya yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., M & Sole, F., B. (2018). E-Learning Moodle, Media Pembelajaran Fisika Abad 21. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika*, 1(2), 57-65.
- BNSP. (2010). Laporan BNSP Tahun 2010. Jakarta: BNSP.
- Delors. (1996). *Learning the Treasure Within, Education for the 21th Century*. New York: UNESCO.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Indonesia, P. R. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Kemendikbud. (2013). Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Smp/Mts Ilmu Pengetahuan Alam (Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013). Jakarta: Kemendikbud.
- Mantja, W. (2002). Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran. Malang: Wineka Media.
- Novaliant, W. (2012). *Implementasi Pendekatan Empat Pilar Pendidikan UNESCO Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X di MAN Rejosari Madiun*. digilib.uinsby.ac.id/9663/5/bab2.pdf.
- Priansa, D. J. (2014). Kinerja dan Profesionalisme Guru. Bandung: Alfabeta.
- Setiawann, E. (2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Suchdi, D., & dkk. (2015). Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.
- Suci, D., L., Ahzan, S., & Pangga, D. (2018). Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Fisika Berbasis Gambar Materi Getaran dan Gelombang. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika*, 1(2), 94-99.
- Sumarsono. (2012). Menjadi Guru Profesional Berkarakter. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang.

- Suprihatiningrum, J. (2013). Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Surya, M. (2013). Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru, untuk Guru. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Wibowo, A. (2013). Pendidikan Karakter Berbasis Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.